

Analisis determinan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus 6 kabupaten di wilayah Karesidenan Kedu)

Enggarsani Maulida Indraswari, Ari Rudatin*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: ari.rudatin@uui.ac.id

JEL Classification Code:

M30, M32, N41

Kata kunci:

Regional expenditure, number of tourist visits, total population, and economic growth

Email penulis:

18313108@students.uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol1.iss1.art12

Abstract

Objectives – This study aims to analyze the effect of regional spending, number of tourist visits, and population on economic growth.

Methods – This study uses a multiple linear regression model with panel data from 2015-2020 in six districts/cities in the Kedu Residency Region.

Findings – The research results show that regional spending has a positive effect on economic growth, and the number of tourist visits positively affects economic growth. The population has no impact on economic growth.

Implications – Analysis of factors that can increase regional economic growth is essential for local governments to boost economic growth. Local governments should know which sectors should be developed more quickly to increase economic growth.

Originality – This study analyzes the effect of regional spending, number of tourist visits, and population on economic growth.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja daerah, jumlah kunjungan wisata, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metode – Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan data panel yang diambil dari tahun 2015-2020 di enam kabupaten/kota di Wilayah Karesidenan Kedu.

Temuan – Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah kunjungan wisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implikasi – Analisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah penting dilakukan sebagai acuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah sebaiknya mengetahui sektor mana saja yang harus dikembangkan lebih cepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Originalitas – Penelitian ini focus untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, jumlah kunjungan wisata, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini membuat negara terus memperbaiki peningkatan kualitas faktor-faktor yang

menjadi pengaruh pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya peran pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki daerah yang tidak sedikit, membuat pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah untuk memudahkan urusan pemerintah pusat dalam membantu meningkatkan perekonomian di setiap daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada saat awal masuk pandemi di Indonesia yaitu tahun 2020 mengalami penurunan. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dimana kabupaten/kota tersebut dikelompokkan lagi kedalam wilayah karesidenan. Karesidenan adalah pembagian wilayah untuk memudahkan urusan administrasi di masa pemerintahan Belanda. Walaupun pembagian wilayah karesidenan sudah tidak digunakan, akan tetapi dalam beberapa hal informal masih digunakan untuk mempermudah urusan administratif. Selain mempermudah urusan administratif, pembagian wilayah karesidenan Kedu masih sering digunakan untuk mempermudah urusan gubernur dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembangunan di wilayah Karesidenan Kedu karena kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Kedu saling berdekatan. Seperti pembentukan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah) untuk pengentasan kemiskinan yang pernah dilaksanakan di Kebumen pada Tahun 2017 bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Pemprov, Jawa Tengah). Terdapat 6 pembagian wilayah Karesidenan di Jawa Tengah, antara lain Karesidenan Banyumas, Kedu, Surakarta, Semarang, Pati dan Pekalongan

Perekonomian suatu wilayah dikatakan meningkat apabila terdapat peningkatan produksi barang atau jasa yang diukur menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu Pendaptan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari sebanyak 6 Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2020 terendah terjadi di Karesidenan Banyumas sebesar 3,76%, kemudian Karesidenan Kedu menempati urutan kedua setelah Karesidenan Banyumas sebesar 4,07% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Karesidenan Semarang sebesar 4,47%. (Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai edisi). Dalam penelitian ini dipilih Karesidenan Kedu karena pertumbuhan ekonomi di Wilayah Karesidenan Kedu sangat berfluktuatif selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Akan tetapi selama tiga tahun terakhir cukup stabil pada tahun 2018-2019 kemudian mengalami minus pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 karena pandemi. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi paling lambat dialami oleh Kota Magelang sebesar -2,45% sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Wonosobo sebesar 5,61% pada tahun 2019 (Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai edisi). Perbandingan pertumbuhan ekonomi terendah dan tertinggi mengalami *gap* yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kedu dalam hal peningkatan perekonomian daerahnya.

Pemerintah daerah sebagai pembantu urusan pemerintah pusat memiliki peran sebagai fasilitator dan *entrepreneurship*. Dalam kegiatan *entrepreneurship*, pemerintah daerah dapat menggunakan haknya untuk mengelola sumber daya yang ada dan memanfaatkan secara efektif serta efisien. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kedu sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah setelah Karesidenan Banyumas membuktikan bahwa dana perimbangan dari pusat dan pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah padahal transfer dana dari pusat dari tahun ke tahun semakin meningkat dan pemerintah daerah belum mampu membiayai daerahnya sendiri menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya kebijakan otonomi daerah ternyata menjadi permasalahan yang baru untuk dihadapi yaitu ketergantungan daerah kepada pusat semakin besar. Menurut Hartarto yang dikutip dalam *Kompas.id* selama 20 tahun otonomi daerah berjalan belum ada tanda-tanda kemandirian fiskal. Rata-rata ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat masih besar yaitu 80,1%. Setiap daerah ingin mengembangkan dan memajukan potensi daerahnya untuk menumbuhkan perekonomiannya, akan tetapi masih sulit dilakukan karena banyaknya kendala yang dialami daerah untuk memanfaatkan haknya sehingga menyebabkan daerah sulit memenuhi kebutuhannya dengan dana yang ada. Padahal setiap tahun pemerintah daerah memerlukan

belanja daerah yaitu dana yang digunakan untuk dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya.

Sebagai gambaran bahwa pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan secara maksimal kekayaan daerahnya yaitu dapat dibuktikan dengan persentase ketergantungan dana pada tahun 2017. Dana yang diperoleh untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah terdiri dari dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pada tahun 2017, sumber dana paling banyak didapatkan dari dana perimbangan sebesar 66,1% sedangkan pendapatan asli daerah sebesar 24,2%. Dana perimbangan yang tinggi menunjukkan bahwa ketergantungan transfer dana dari pusat masih besar, dan pendapatan asli daerah yang rendah menunjukkan bahwa daerah belum bisa memanfaatkan kekayaan daerahnya. Padahal setiap kepala daerah berhak menentukan alokasi belanja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Daerah nomor 105 tahun 2000 yang membahas mengenai keuangan daerah bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah berhak untuk mengelola keuangan daerahnya dengan tanggung jawab penuh dalam rangka menyediakan kebutuhan daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan belanja daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja barang/jasa, belanja pegawai, pembayaran pokok, dan penyertaan modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja bagi hasil untuk pemerintah desa, belanja bunga, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah. Dana yang digunakan untuk melakukan belanja daerah tentunya didapatkan dari dana perimbangan, PAD, dan dana lain-lain yang sah. PAD selama ini tidak sepenuhnya membantu meningkatkan keuangan daerah dan masih banyak bergantung dari dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD agar pemerintah daerah tidak ketergantungan dengan dana dari pemerintah pusat. PAD didapatkan dari penarikan pajak, redistribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu mengembangkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Kedu memiliki daya tarik wisata yang terbilang cukup potensial. Peluang pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pariwisata terbuka lebar karena beberapa Kabupaten di Wilayah Karesidenan Kedu memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam seperti Kabupaten Kebumen yang berlokasi di selatan Pulau Jawa memiliki banyak pariwisata laut, Kabupaten Magelang memiliki candi terbesar di dunia yang menarik banyak wisatawan dari manca negara. Kekayaan alam dan budaya ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Jumlah kunjungan pariwisata di 6 Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kedu sangat berfluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan jumlah kunjungan wisata ini diindikasikan karena dampak dari pandemi Covid-19 dimana terdapat kebijakan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat berpergian keluar rumah. Jumlah kunjungan wisata tertinggi ada di Kabupaten Magelang dan terendah ada di Kabupaten Purworejo. Jumlah kunjungan wisata yang semakin banyak tentunya diharapkan dapat memutar roda perekonomian di daerah yang bersangkutan apabila wisatawan mengeluarkan pendapatannya untuk konsumsi.

Faktor lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani, dkk (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka produktifitas juga semakin meningkat. Akan tetapi sejumlah ahli ekonomi mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang karena bertambahnya jumlah penduduk juga akan menambah angkatan kerja (Rahmattullah, 2015). Jumlah penduduk yang tinggi akan melahirkan banyaknya angkatan kerja yang tinggi. Pemerintah harus dapat memberdayakan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan hal produktif. Dari data jumlah penduduk di 6 Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Kedu selalu meningkat dari tahun 2015-2020.

Peningkatan jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dan Kabupaten Magelang menjadi urutan kedua pertumbuhan penduduk terbanyak setelah Kabupaten Kebumen. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun apabila dibarengi dengan peningkatan produktifitas sumber daya manusia maka pertumbuhan ekonomi akan sulit meningkat karena bertambahnya penduduk berarti terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga apabila tidak dibarengi dengan dibukanya lapangan kerja maka akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tentu saja dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pengelolaan anggaran belanja, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah dengan efektif serta seefisien mungkin dalam rangka menaikan PDRB dari tahun ke tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, jumlah kunjungan wisatawan, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Kedu tahun 2015-2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Sebagai variabel dependen adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel independen Belanja Daerah, Jumlah Kunjungan Wisata dan Jumlah Penduduk. Metode analisis menggunakan analisis kuantitatif regresi data panel, dimana *data time series* berupa data runtut waktu dari 2015 - 2020, sedangkan data *cross section* terdiri dari 6 kabupaten/kota di wilayah karisidenan Kedu Jawa Tengah.

Adapun persamaan model regresi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (%)

β = Koefisien regresi (variabel independen)

α = Konstanta

X₁ = Belanja daerah (ribu rupiah)

X₂ = Jumlah kunjungan wisata (jiwa)

X₃ = Jumlah penduduk (jiwa)

e = Error term

i = Individu ke-i

t = Period ke-t

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan serangkaian uji statistik, maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi *Common Effect* Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.998095	0.766794	1.301647	0.2023
X1(BELANJA DAERAH)	3.301141	0.483177	6.832163	0.0000
X2 (JUMLAH KUNJUNGAN WISATA)	4.42E-07	2.27E-07	1.944483	0.0607
X3 (JUMLAH PENDUDUK)	-4.54E-06	8.71E-07	-5.207143	0.0000
R-squared	0.682552	Mean dependent var		4.069444
Adjusted R-squared	0.652791	S.D. dependent var		2.699204
S.E. of regression	1.590491	Akaike info criterion		3.870402
Sum squared resid	80.94922	Schwarz criterion		4.046349
Log likelihood	-65.66724	Hannan-Quinn criter.		3.931812
F-statistic	22.93459	Durbin-Watson stat		1.339102
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil estimasi regresi menggunakan *common effect* dihasilkan *R-square* sebesar 0,682552. Artinya variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted* sebesar 0.652791 artinya 65,27% variasi variabel belanja daerah, jumlah kunjungan wisata, dan jumlah penduduk mempengaruhi variasi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 65,27% dan sisanya sebesar 34,73% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Sementara itu dari hasil uji statistic didapatkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dari pengujian t diperoleh nilai konstanta dari hasil analisis sebesar 0,998095 berarti bahwa besarnya PDRB adalah sebesar 998.095.000 rupiah. Dengan catatan saat variabel belanja daerah, jumlah kunjungan wisata, dan jumlah penduduk dianggap konstan atau sama dengan 0. Koefisien regresi variabel belanja daerah sebesar 3,301141 (probabilitas t-statistic sebesar 0,0000), menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap PDRB. Koefisien regresi variabel jumlah kunjungan wisata sebesar 4,42 (probabilitas t-statistic sebesar 0,0607) artinya jumlah kunjungan wisata berpengaruh positif terhadap PDRB. Koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar -4,54 (0,0000), artinya jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap PDRB, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Dalam penelitian ini persamaan model regresi yang digunakan yaitu:

$$\begin{aligned} Y &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \\ \text{PDRB} &= 0.998095 + 3.301141 \text{ BD} + 4.42\text{E-}07 \text{ JKW} - 4.54\text{E-}06 \text{ JP} + e \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa apabila semua variabel independen dianggap konstan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 0.998095%. Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan model *common effect* menunjukkan bahwa variabel belanja daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel belanja daerah sebesar 3.301141 artinya apabila belanja daerah naik sebesar 1 ribu rupiah maka PDRB akan meningkat sebesar 3.301141%. Hasil ini tidak sesuai atau bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kisra (2014) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Hasbullah (2020) menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa belanja daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori, belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mengalokasikan kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa dapat meningkatkan laju perekonomian.

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan model *common effect* menunjukkan bahwa variabel jumlah kunjungan wisata (X_2) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel jumlah kunjungan wisata sebesar 4.42E-07 artinya apabila jumlah kunjungan wisata naik sebesar 1 jiwa maka PDRB akan meningkat sebesar 4.42E-07%. Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Rahmini (2019) yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa bila kunjungan wisata semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena apabila wisatawan melakukan transaksi selama berwisata akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan pelaku industri yang berada di sekitar obyek wisata. Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan model *common effect* menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (X_3) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penyebab bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan penurunan PDRB yaitu karena banyaknya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan pengangguran. Jumlah penduduk yang banyak tidak meningkatkan produktivitas akan tetapi meningkatkan pengangguran karena penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Hasil analisis penelitian ini mendukung penelitian Lincoln yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan

menimbulkan berbagai masalah karena jumlah penduduk yang tinggi berarti akan melahirkan jumlah tenaga kerja yang tinggi. Apabila jumlah tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja maka akan berdampak pada kemunduran ekonomi. Alasan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kedu karena penambahan penduduk dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja sebagai penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran masih tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi akan berdampak pada kegiatan ekonomi yang semakin menurun karena daya beli masyarakat tentu akan berkurang dan menyebabkan permintaan terhadap hasil produksi barang atau jasa juga akan berkurang (Ishak, 2018).

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa belanja daerah dan kunjungan wisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kedu tahun 2015-2020. Sementara itu hipotesis jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kedu tahun 2015-2020 tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan dibukanya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran mengalami peningkatan. Pandemi covid-19 juga turut serta mempengaruhi peningkatan pengangguran karena banyak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Penelitian yang telah dilakukan tidak selalu mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi hasil dari penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa peran pemerintah daerah Wilayah Karesidenan Kedu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Analisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah penting dilakukan sebagai acuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah sebaiknya mengetahui sektor mana saja yang harus dikembangkan lebih cepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa terdapat kesesuaian antara teori dan variabel yang diambil dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Karesidenan Kedu. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat memanfaatkan belanja daerah untuk hal-hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian menunjukkan jumlah kunjungan wisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pemerintah daerah dapat meningkatkan daya tarik wisata untuk terus menarik wisatawan datang ke obyek wisata Wilayah Karesidenan Kedu. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan menyediakan lapangan pekerjaan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). "Sosial dan Kependudukan" <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#:~:text=Penduduk%3A,bulan%20tetapi%20bertujuan%20untuk%20menetap.> (Diakses pada 13 Februari 2022)
- Fadhila, Rafli., Rahmini Noor. (2019). "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Lama Menginap Wisatawan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 2. No. 1. Hal 21-32. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/1152>
- Fatimah, Siti., Hasbullah, Yusuf. (2020). "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019". *Journal Ekobis*. Vol. 6. No. 2. <https://ekonobis.unram.ac.id/index.php/ekonobis/article/view/45/42>

- Ishak, Khodijah. (2018). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Infikasi Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 7. No. 1. <https://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). “Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja”. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>
- Kisra, Jeval. (2014). “Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Nagan Raya”. *Skripsi*. <http://repository.utu.ac.id/408/1/I-V.pdf>
- Kompas.id. (2021). “Pandemi Menguji Prakteik Desentralisasi”. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. <https://www.kppod.org/berita/view?id=962> (diakses pada 21 Desember 2021)